

Abdul. K.A, Mulyadi. B, Indah. S.U (2023). Peran Dinas Perikanan dan Kelautan Dalam Pemberdayaan Nelayan di Wilayah Pesisir Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Prediksi Vol. 22(3). 192-201*

---

## Peran Dinas Perikanan dan Kelautan Dalam Pemberdayaan Nelayan di Wilayah Pesisir Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

**Kartini Maharani Abdul<sup>1</sup>, Budi Mulyadi<sup>2\*</sup>, Sinta Umala Indah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Kalimantan Utara

Email: : <sup>1</sup>[Kartinimaharani92@gmail.com](mailto:Kartinimaharani92@gmail.com), <sup>2</sup>[Mulyadibudi12@gmail.com](mailto:Mulyadibudi12@gmail.com), <sup>3</sup>[sinta.umala@gmail.com](mailto:sinta.umala@gmail.com)

---

### INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

08 Oktober 2023

Received in revised form:

15 Oktober 2023

Accepted:

21 Oktober 2023

### Keyword:

*Role of Fisheries and Marine Service, Empowerment, Fishermen.*

### Kata Kunci:

Peran Dinas Perikanan dan Kelautan, Pemberdayaan, Nelayan.

### ABSTRACT

*This study aims to understand the role of the Department of Fisheries and Marine Affairs in empowering fishing communities in the coastal area of Tanah Kuning Village and to determine the factors that influence the empowerment of fishing communities in the coastal area of Tanah Kuning Village, Tanjung Palas Timur District, Bulungan Regency, North Kalimantan Province. The research method used in this study is a qualitative method. From the results of this study, it is known that the Department of Fisheries and Marine Affairs of Bulungan Regency has carried out its role by making several program activities for empowerment. The program activities are education and training, counseling and guidance, institutionalization or formation of fisherman groups, easy access to technology and communication and business partnerships. Activities made by the Fisheries and Marine Service of Bulungan Regency are based on the legal basis of government regulation No. 50 of 2015 concerning the empowerment of fish fishermen and small fish cultivators. In addition, there are supporting factors and inhibiting factors that affect the empowerment. The supporting factors consist of business capital assistance and government policies, and the inhibiting factors consist of the quality of human resources and budget constraints.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Dinas Perikanan dan kelautan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir Desa Tanah Kuning dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan di Wilayah pesisir Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan telah melaksanakan perannya dengan membuat beberapa program kegiatan untuk pemberdayaan. Adapun program kegiatannya yakni pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pembimbingan, kelembagaan atau pembentukan kelompok nelayan, kemudahan akses teknologi dan komunikasi serta kemitraan usaha. Kegiatan yang dibuat oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan didasarkan dengan dasar hukum peraturan pemerintah No 50 Tahun 2015 Tentang pemberdayaan masyarakat nelayan ikan dan pembudidaya ikan-ikan kecil. Selain itu terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pemberdayaan tersebut. Faktor pendukung terdiri atas bantuan modal usaha dan kebijakan pemerintah, dan faktor penghambat terdiri atas kualitas SDM dan keterbatasan anggaran.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

---

\* Corresponding author: [Mulyadibudi12@gmail.com](mailto:Mulyadibudi12@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah saat ini, sepertihalnya yang tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa: "Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan dari kelompok masyarakat yang terikat secara hukum dan memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur, mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut serta mengatur prakarsa atau kemuan sendiri yang berdasarkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Oleh karena itu, Desa Tanah Kuning sebagai salah satu wilayah pesisir di daerah otonom Kabupaten Bulungan yang mayoritas masyarakatannya sebagai nelayan sudah menjadi keharusan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan untuk mengatur kepentingan rumah tangga dan mengelola potensi sumber daya alam maupun melakukan pemberdayaan para nelayan.

Masyarakat nelayan adalah salah satu kelompok sosial yang kerap didera kemiskinan. Kemiskinan dikarenakan oleh beberapa faktor kompleks yang saling berhubungan dan berpotensi melemahkan masyarakat untuk membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan. Sehingga, kemiskinan bisa menjadi isu utama dalam pembangunan wilayah pesisir. Tingkat pendapatan nelayan yang rendah juga berpengaruh kepada kesejahteraan keluarga para nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil usaha perikanan. Istri dan anak dari nelayan pada umumnya melakukan usaha pengelolaan sederhana dari hasil tangkapan untuk mendapatkan tambahan uang dan dipasarkan secara tradisional dengan harga relatif murah.

Paradigma kemiskinan masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil laut kemudian sering menjadi gambaran tekanan situasi dalam sektor perikanan. Fadel Muhammad (2009) mengemukakan bahwa "Sampai ini masih banyak masyarakat nelayan hidup dibawah garis kemiskinan, kita mengupayakan dengan adanya kebijakan mengenai nelayan maka hal ini bisa meningkatkan taraf kehidupan maupun tingkat sejahtera yang lebih meningkat." Hal ini selaras dengan keadaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir, dimana kemiskinan masih menjadi kondisi rawan. Pendapatan yang didapatkan oleh para buruh nelayan maupun nelayan kecil tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Saat ini, terdapat beberapa kebijakan yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, salah satunya adalah undang-undang yang berlaku secara nasional yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Kebijakan tentunya diperlukan agar perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan nantinya bisa mencapai target dan mengharuskan adanya penekanan yang lebih terhadap implementasi hukum yang ada.

Pengaturan hasil perikanan sangat bergantung pada potensi ikan yang pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukan secara langsung oleh nelayan. Dalam pelaksanaannya tentu nelayan mengalami beberapa permasalahan dan kendala antara lain ancaman ketersediaan bahan bakar minyak, pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih, perubahan iklim dan cuaca serta tingginya gelombang laut. Masyarakat di wilayah pesisir pantai cenderung memiliki tingkat perekonomian relatif minim, dimana pada musim barat, sebagian nelayan tidak bisa untuk melaut sedangkan sebagian besar dari mereka hanya menggantungkan hidupnya dari hasil ikan di laut. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka dari itu masyarakat nelayan perlu mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan termasuk keluarga yang juga ikut melakukan pengelolaan dan pemasaran. Masyarakat nelayan harus dilakukan berbagai upaya pengembangan dan peningkatan mata

pencaharian alternatif sebagai salah satu cara yang harus targetkan sebagai hal yang bersifat prioritas.

Memberdayakan masyarakat nelayan sama halnya dengan menciptakan peluang bagi nelayan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan guna memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan yang tepat akan menghasilkan kemandirian permanen dalam masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, apakah pemerintah daerah khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaannya sudah merealisasikan kewajiban pemberdayaan masyarakat dengan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengingat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah pesisir tersebut, memerlukan kolaborasi antara peran pemerintah daerah dan masyarakat nelayan.

Sehingga nelayan di wilayah pesisir Desa Tanah Kuning mampu meningkatkan daya saing untuk mengelola hasil tangkapan laut secara inovatif. Tetapi, hingga saat ini cara penangkapan dan pengelolaan hasil laut masih dilakukan secara tradisional oleh masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal oleh beberapa informan perangkat desa, peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan nelayan di Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dapat diidentifikasi dalam berbagai hal yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan telah berusaha memberikan motivasi dan dorongan dalam upaya pelaksanaan pemberdayaan nelayan. Tetapi pemberdayaan harus tetap ditingkatkan sehingga pemerintah daerah terus berupaya dengan mengadakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan maupun pendampingan terhadap nelayan di wilayah pesisir dalam pengelolaan hasil tangkapan.

Berbagai permasalahan terhadap masyarakat nelayan seperti tingkat pendidikan masyarakat nelayan yang rendah, tingkat produktifitas yang minim dan status ekonomi mencirikan kesejahteraan yang belum terpenuhi.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya (Djam'an Satori, 2011:23). Menurut Sugiyono (2012:9) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian untuk diolah merupakan data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berikut:

1. Observasi Menurut Sutrisno Hadi (2010:166) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi pada penelitian ini dilakukan di Desa Tanah Kuning dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

2. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan. Narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah Sekertaris Dinas Perikanan dan Kelautan, Sekertaris Desa Tanah Kuning, Ketua koperasi dan masyarakat nelayan 10 orang.
3. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2015:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
4. Studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. (Sugiyono, 2012:291).

### **Teknik Analisa Data**

Penelitian ini bersifat menjelaskan data hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara lengkap, sistematis dan mudah dipahami serta diinterpretasikan agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisa data lalu menggambarkan tentang fenomena yang terjadi. Sugiyono (2011:247), Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dapat dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Reduksi Data Sugiyono (2011:247): Reduksi data diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian Data Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Sugiyono (2011:249): Penyajian data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Verifikasi dan Kesimpulan Menurut Sugiyono (2011:253): Verifikasi dan Kesimpulan ialah, "Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori". Sangadji (2010:210): Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bidang perikanan dan kelautan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sehingga mampu menjadi sumber mata pencaharian masyarakat secara berkelanjutan. Mengingat lahan pertanian semakin lama akan terkikis untuk pembangunan, sehingga bidang perikanan dan kelautan menjadi salah satu sumber daya yang mumpuni untuk menunjang ekonomi masyarakat. Tentu hal ini tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Daerah maupun Dinas Perikanan dan Kelautan. Peran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan diwujudkan dengan melakukan pemberdayaan. Meskipun pada masa pandemi covid-19 seperti saat ini tetapi program pemberdayaan tetap diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. Pemberdayaan nelayan di Desa Tanah Kuning merupakan bentuk upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat nelayan di desa tersebut. Dalam merealisasikan perannya Dinas Perikanan dan Kelautan menggunakan beberapa dasar hukum salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Ikan Kecil. Upaya Pemberdayaan masyarakat nelayan perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka pemberdayaan agar mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu Peraturan Pemerintah. Dasar hukum tersebut kemudian dijadikan strategi untuk mengaplikasikan perannya menjadi sebuah program-program pemberdayaan bagi masyarakat nelayan. Adapun strategi yang dijadikan untuk mengaplikasikan peran-peran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Tanah Kuning terdiri dari 5 hal yaitu:

1. Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat nelayan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidayaan Ikan-Ikan Kecil khususnya pada pasal 11. Bentuk dari program Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat nelayan di Desa Tanah Kuning salah satunya adalah Bimtek. Melalui Bimtek ini masyarakat nelayan akan diberi pelatihan terkait dengan mesin, cara penggunaan alat tangkap yang tidak merusak lingkungan dan lain sebagainya. Selain itu Dinas Perikanan dan Kelautan juga mengadakan pelatihan pembuatan terumbu karang buatan atau bioreefteknik. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada nelayan mengenai langkah strategis untuk mengembalikan ekosistem terumbu karang. Program pendidikan dan pelatihan ini memberikan wadah untuk masyarakat nelayan untuk mendapatkan peningkatan kualitas demi peningkatan produktifitas hasil tangkapan nelayan dan peningkatan kesejahteraannya. Namun kendala masih terjadi karena beberapa nelayan belum mendapatkan kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan karena ketidaktepatan waktu dan minat untuk ikut turut serta dalam kegiatan yang kurang.
2. Mengadakan Penyuluhan dan Pendampingan. Penyuluhan mengarah kepada sebuah program yang memberikan informasi kepada setiap nelayan mengenai aktivitas penangkapan ikan maupun pengelolaan hasil laut. Sedangkan untuk pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping yang terdiri dari seorang penyuluh perikanan. Setiap desa akan mendapatkan satu orang Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL). Berikut sama halnya

dengan Desa Tanah Kuning yang terdapat seorang PPL yakni Ibu Aidah. Tugas dari PPL tersebut membantu kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan untuk memberikan penyuluhan terkait perikanan maupun pembudidaya ikan. Adapun tema penyuluhan adalah tentang pengelolaan hasil tangkapan laut, cara pemasaran hasil tangkapan dan sebagainya. Tetapi tidak semua materi dari penyuluhan dipraktekkan oleh masyarakat nelayan. Misalnya saja tentang pengelolaan hasil tangkapan menjadi produk untuk istri-istri para nelayan. Secara umum hasil tangkapan masyarakat nelayan di Desa Tanah Kuning langsung di jual berupa ikan segar kepada pengepul atau pedagang ikan di Kecamatan Tanjung Selor. Apabila ada hasil tangkapan yang masih tersisa mereka akan jemur dan membuatnya menjadi ikan asin untuk dijual. Selain itu Dinas Perikanan dan kelautan juga mengadakan distribusi benih udang dan bandeng pada tambak percontohan di Desa Tanah Kuning. Tetapi terdapat beberapa masyarakat nelayan yang mengaku belum pernah mengikuti bentuk penyuluhan apapun. Bahkan mereka merasa tidak mendapat perhatian dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Cenderung mereka berpendapat kalau pemerintah pilih kasih dengan nelayan terdekat saja. Dari pihak Dinas Perikanan dan Kelautan menjelaskan hal tersebut bisa terjadi karena kurang pemerataan pada semua masyarakat nelayan di Desa Tanah Kuning mengingat waktu kegiatan yang telah terjadwalkan dan akses jalan yang jauh.

3. Kemitraan Usaha. Bentuk dari kemitraan usaha ini adalah kerjasama dengan perusahaan maupun dengan lembaga perbankan. Kerjasama Dinas Perikanan dan Kelautan dengan perusahaan diwujudkan dengan pelatihan. Sedangkan kerja sama kemitraan dengan lembaga keuangan seperti Bank akan berupa bantuan permodalan. Adapun lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk membantu permodalan masyarakat nelayan adalah BRI, BNI dan Mandiri. Namun, masih terdapat masyarakat nelayan di Desa Tanah Kuning tersebut mengeluh tidak pernah mendapatkan bantuan permodalan dan kesulitan mencari mitra usaha untuk mengembangkan dan membantu usaha perikanan tangkapnya. Hal tersebut diakui karena proses administratif dari persyaratan untuk mendapatkan bantuan cukup rumit. Hal tersebut membuat masyarakat nelayan malas untuk memenuhi prosedur yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan.
4. Memberi Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi. Dinas Perikanan dan Kelautan berupaya memberdayakan masyarakat nelayan dengan berperan memberikan kemudahan akses teknologi. Hal ini diadakan karena kesadaran bahwa semakin hari kemajuan teknologi akan semakin pesat. Maka dari itu semua sektor harus siap menuju kecanggihan teknologi. Dinas Perikanan dan Kelautan juga dapat menginput data informasi melalui sebuah web yang terhubung langsung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni web KUSUKA pada laman <https://satudata.kkp.go.id>. Pada laman tersebut petugas dari Dinas Perikanan dan Kelautan dan penyuluh bisa membuka web sehingga dapat memberitahukan informasi kepada masyarakat nelayan terkait dengan statistika perikanan dan kelautan kemudian harga grosir ikan eceran dan sebagainya. Selain itu juga ada Kartu PELATAR (Pelaku Usaha Perikanan) yang bisa di akses secara online. Selain laman web secara online kemudahan akses teknologi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan didampingi dengan Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) juga mengadakan sosialisasi aplikasi e-Lobster dan pengembangan pelaku usaha. Penggunaan aplikasi ini sebagai wujud dari penggunaan akses teknologi pengelolaan perikanan lobster secara berkelanjutan yang berfungsi untuk pendataan. Hal-hal ini juga wadah penambah pengetahuan masyarakat nelayan untuk memahami aplikasi-aplikasi berbasis online.

5. Kelembagaan. Dinas Perikanan dan Kelautan menekankan adanya kelembagaan kepada masyarakat nelayan di Desa Tanah Kuning. Melalui kelembagaan ini masyarakat nelayan dapat mengembangkan dirinya, memudahkan akses permodalan dan pasar kelembagaan kelompok perlu diperkuat, dibimbing dan didampingi sehingga kelembagaan kelompok nantinya dapat mandiri baik dalam menjalankan usahanya ataupun dalam mengatasi kesulitan akses permodalan maupun pemasaran. Bentuk dari program kelembagaan adalah kelompok-kelompok nekayan atau yang biasanya disebut Kelompok Usaha Bersama (KUB). Adapun tujuan dibentuknya kelembagaan atau kelompok nelayan adalah untuk memudahkan Dinas Perikanan dan Kelautan dalam pemberian informasi dan mengoordinir ketika ada bantuan. Ketika masyarakat nelayan terpisah secara individu-individu maka pelaksanaan memberikan informasi dan bantuan akan lebih membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan kelompok. Satu kelompok nelayan atau KUB di Desa Tanah Kuning terdiri atas 10 sampai 15 orang. Dalam kelompok tersebut akan ada penanggung jawab yakni ketua kelompok. Pembentukan kelompok nelayan atau KUB harus disesuaikan dengan alat tangkap yang sama. Mengingat nelayan di Desa Tanah Kuning terdiri atas beberapa alat tangkap yang berbeda seperti pukat hela atau troll, bagan tancap, gillnet, trammelnet dan sebagainya. Ketika ada informasi terkait bantuan maka kelompok nelayan yang telah mendaftarkan diri dan telah dikukuhkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan bisa membuat proposal pengajuan bantuan. Untuk menambah legalitas atas proposal kelompok nelayan atau KUB bisa meminta stempel kepada ketua koperasi nelayan yang ada di desa tersebut. Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Bulungan juga tetap berperan dalam pembentukan kelompok nelayan karena disadari dari Desa Tanah Kuning tersebut masih ada beberapa nelayan yang belum bergabung dalam sebuah kelompok nelayan. Oleh karena itu Dinas Perikanan dan Kelautan mengadakan sosialisasi kelembagaan untuk kelompok-kelompok nelayan. Selain bisa mendapatkan bantuan pembentukan kelembagaan atau kelompok nelayan juga bisa memberikan manfaat lainnya. Contohnya ketika ada beberapa KUB yang telah terbina secara mandiri maka kelompok ini bisa membagi ilmunya kepada masyarakat nelayan lain sehingga lambat laun masyarakat nelayan Desa Tanah Kuning akan saling bekerja sama, terberdaya dan mandiri secara bersama-sama.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peremberdayaan Masyarakat Nelayan.**

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut:

#### **1. Faktor Pendukung**

##### **a. Bantuan Modal Usaha**

Sebuah bantuan modal akan menunjang usaha perikanan dan meringankan beban masyarakat nelayan. Dinas Perikanan dan Kelautan memberikan bantuan modal kepada masyarakat nelayan di Desa Tanah Kuning berupa uang tunai tetapi biasanya lebih sering bantuan modal berupa barang seperti alat tangkap, jaring, pukat, mesin jenset dan sebagainya. Bahkan ada kelompok nelayan yang pernah mendapatkan bantuan modal berupa perahu.

##### **b. Kebijakan Pemeritahan**

Kebijakan adalah faktor pendukung pemberdayaan yang bersifat kuat, karena semua peran dan wewenang dari Dinas Perikanan dan Kelautan diatur dalam kebijakan dan harus

dilaksanakan menjadi sebuah program-program yang meningkatkan produktifitas masyarakat nelayan sesuai dengan regulasi.

## 2. Faktor Penghambat

### a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam penentu pelaksanaan sebuah program pemberdayaan. Penduduk yang besar akan menjadi aset pembangunan jika sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas. Oleh karena itu Dinas Perikanan dan Kelautan perlu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengupayakan peningkatan keahlian dan ketrampilan masyarakat nelayan di Desa Tanah Kuning. Tetapi dalam kualitas masih dipertanyakan, mengingat ada beberapa hal yang mempengaruhi seperti halnya tingkat pendidikan dan karakter sumber daya manusianya.

### b. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan faktor yang turut berpengaruh dalam sebuah pemberdayaan. Program kegiatan maupun bantuan modal usaha tentunya akan membutuhkan sebuah anggaran. Sehingga bisa dikatakan anggaran adalah penggerak dari kelancaran program pemberdayaan masyarakat nelayan. Tetapi jumlah anggaran yang disediakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan sering tidak sebanding dengan banyaknya permintaan bantuan dari masyarakat nelayan termasuk bagi nelayan di Desa Tanah Kuning.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan telah melaksanakan perannya dengan membuat beberapa program kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Tanah Kuning. Adapun bentuk program yang diadakan tersebut adalah

1. Membuat pendidikan dan pelatihan, dimana Dinas Perikanan dan Kelautan mengadakan Bimtek yang bertemakan perawatan mesin kapal, cara penggunaan alat tangkap yang tidak merusak lingkungan dan pelatihan pembuatan terumbu karang buatan bagi masyarakat nelayan.
2. Mengadakan penyuluhan dan pendampingan, Dinas Perikanan dan Kelautan telah mengadakan penyuluhan bagi masyarakat nelayan Desa Tanah Kuning dengan beberapa materi yang diberikan seperti cara pengolahan hasil tangkapan laut menjadi produk kepada istri-istri nelayan, cara pemasaran dan distribusi benih udang dan bandeng (polikultur) pada tambak sebagainya. Selain itu di Desa Tanah Kuning juga terdapat 1 orang PPL (Penyuluh Perikanan Lapangan) yang bertugas mendampingi para nelayan.
3. Menjadi jembatan untuk kemitraan usaha, sebagai upaya memberi kemudahan kepada masyarakat nelayan di Desa Tanah Kuning Dinas Perikanan dan Kelautan membantu memberikan akses kemitraan usaha seperti mitra usaha dengan perusahaan maupun lembaga keuangan atau bank. Sejauh ini bank yang bekerjasama untuk bantuan permodalan adalah bank BRI, BNI dan Mandiri.
4. Kemudahan akses teknologi dan informasi, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan telah berupaya memberikan pelayanan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi secara



online dan memberikan kemudahan akses teknologi seperti sosialisasi aplikasi eLobster untuk pelaku usaha.

5. Membentuk kelembagaan, masyarakat nelayan diarahkan dan difasilitasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan untuk membuat kelompok nelayan atau KUB (Kelompok Usaha Bersama) dan pemberian sosialisasi kelembagaan sebagai salah satu persyaratan mendapatkan bantuan.

### **Saran**

1. Bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan, diharapkan mampu memberikan inovasi-inovasi program pemberdayaan baru bagi masyarakat nelayan, memberikan penambahan kuota kelompok nelayan atau KUB yang mendapatkan bantuan dan melakukan pemerataan program kegiatan serta bantuan usaha modal kepada semua masyarakat nelayan. Adapun untuk kegiatan yang telah dijalankan seperti pelatihan, pendidikan, penyuluhan dan sebagainya agar lebih dioptimalkan kembali sehingga mencapai tujuan pemberdayaan yang diharapkan.
2. Bagi pemerintah Desa Tanah Kuning, diharapkan mampu menjadi jembatan untuk program-program dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan yang diberikan kepada masyarakat nelayan dengan merata dan maksimal. Dibutuhkan juga sinergi pemerintah desa untuk ikut serta mengimbau dan memberikan informasi secara jelas terkait bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan kepada semua masyarakat nelayan.
3. Bagi masyarakat nelayan, tingkat partisipasi untuk aktif dalam mengikuti semua kegiatan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan harus ditingkatka kembali. Selain itu masyarakat nelayan juga harus memahami kebtuhan yang prioritas untuk diajukan bantuan kepada Dinas Perikanan dan kelautan. Karakter kurang baik seperti tidak mengikuti persyaratan pengajuan proposal yang dianggap rumit dan sifat individual masih tinggi harus dikurangi, sehingga masyarakat nelayan disarankan untuk memupuk rasa solidaritas demi kerjasama untuk pemberdayaan, kemandirian dan menuju kesejahteraan bersama-sama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU:**

- Aan Komariah, Djam'an Satori. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Adisasmito, Wiku. 2015. Sistem Kesehatan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Fauzi. 2009. Tingkat pencemaran logam berat dalam air laut dan sedimen di perairan pantai Muna, Kabaean, dan Buton Sulawesi Tenggara. *Makara Sains*, 13(2), 117-124.
- Anwas, Oos M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Jakarta: ALFABETA
- Dahuri, Rokhmin, dkk. 2013. Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: Balai Pustaka (Persero).
- Damsar. 2011. Pengantar Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Kencana. Hal. 155.
- Darminto, Dwi Prastowo & Rifka Julianty, 2002, Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Manfaat, AMP-YKPN, Yogyakarta.
- Fadel, Muhammad. 2009. Reinventing Local Government. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2009. Teori Kritis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara.

- Inu Kencana Syafii. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Istianto, Bambang. 2009. Manajemen Pemerintahan Dalam Persepektif Pelayanan Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kusnadi. 2009. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember. 152 hlm.
- Labolo, Muhadam. 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi. 2005. Ekonomi Kelautan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sunarno, Siswanto. 2014. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Soerjono Suekamto. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Supriharyono. 2009. Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati dan Wilayah Pesisir dan Laut Tropis (Cetakan Pertama, Edisi Kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Pustaka Phoenix. 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Phoenix, hal. 652
- Tjandra, W. Riawan, 2009, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Widanti, Ni Putu Tirka. 2011. Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Bali. Denpasar: Jagad Press
- Yafii, Inu Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua. Bandung: Mandar Maju

#### **JURNAL:**

- Cahyadinata, Indra. 2009. Kesesuaian Pengembangan Kawasan Pesisir Pulau Enggano Untuk Pariwisata Dan Perikanan Tangkap. Jurnal AGRISEP, Vol. 9 No. 2 Tahun 2009.
- Nasional, Munzilir Rohma dkk. 2015. "Analisis Pendapatan Nelayan Bagan Studi Di Desa Sarang Tiung Kalimantan Selatan, Universitas Indonesia, ISSN: 2477-6475. Departemenn
- Hariyanto, Slamet. 2014. Analisis pemberdayaan masyarakat nelayan di pantai prigi kecamatan watulimo kabupaten trenggalek jurnal universitas tulungagung bonorowo vol. 2.no.1

#### **INTERNET:**

- Asril, Sabrina. 2018. Indonesia Daftarkan 16.056 Pulau ke PBB. <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/04/20442371/indonesia-daftarkan-16056-pulau-bernama-ke-pbb>. Diposting pada 04 Mei 2018 Pukul 20:44 WIB.
- Syafrillia, Nabila. 2015. Definisi dan pengertian Analisis Menurut Para Ahli. [https://www.academia.edu/8798195/diakses\\_pada\\_13\\_Februari\\_2015](https://www.academia.edu/8798195/diakses_pada_13_Februari_2015). Diakses pada 13 Februari 2015.